



# Anak & Cucu Sama-Sama Daftar ke Satu SMP

JOGJA—Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Jogja menemukan sejumlah pendaftar sekolah yang berasal dari satu kartu keluarga dengan status sebagai anak dan cucu.

Triyo Handoko, Anisatul Umah, & David Kurniawan  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Disdikpora Kota Jogja mengaku tidak betul-betul melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk jalur zonasi atau domisili dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. "Verifikasi tidak kami lakukan karena sangat memakan waktu," kata Kepala Disdikpora Jogja Budi Santoso Asrori, Jumat (17/6).

Indikator PPDB jalur zonasi diukur dari

titik tengah RW domisili calon peserta didik. Penggunaan indikator tersebut memungkinkan adanya calon peserta didik yang memiliki skor jarak yang sama hingga jarak yang sangat dekat. Budi menyebut indikator tersebut bersifat mutlak dan tak ada verifikasi lapangan.

► Untuk mengantisipasi kecurangan caranya dengan menerapkan aturan minimal satu tahun perpindahan.

► Tak ada kebijakan khusus untuk migrasi penduduk menjelang PPDB.

► Halaman 8

## Anak & Cucu...

Namun, Budi mengaku sempat beberapa kali mengecek, seperti dalam PPDB di SMPN 5 Jogja "Kemarin sempat heboh di SMPN 5 Jogja ada banyak anak dengan skor jarak yang sama. Setelah kami cek dalam satu Kartu Keluarga [KK] ada banyak yang mendaftar sekolah dengan status di KK sebagai anak dan cucu," kata Budi.

Sementara di SMPN 8 Jogja, kata Budi, ada enam peserta PPDB yang memiliki skor jarak yang sama yaitu 13 meter, karena dalam satu RW ada enam yang mendaftar ke SMPN 8 Jogja.

Terkait dengan kemungkinan kecurangan PPDB berupa menumpang domisili, Disdikpora tak bisa memverifikasinya.

"Kalau menumpang ke sanak-saudara yang rumahnya dekat dengan sekolah itu kewenangan Disdukcapil [Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil]," ujarnya.

Satu upaya yang bisa dilakukan Disdikpora untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan tersebut, jelas Budi, dengan menerapkan aturan minimal satu tahun perpindahan domisili dalam KK saat PPDB. "Kalau kurang dari satu tahun kami tidak proses PPDB-nya," katanya.

Kepala Disdukcapil Jogja, Septi Sri Rejeki, menjelaskan tak ada kebijakan khusus untuk migrasi penduduk menjelang PPDB. "Kami layani semuanya dengan tujuan apa pun asal memenuhi syarat," katanya.

Pasalnya jika memberlakukan aturan khusus berpotensi menimbulkan masalah pada profesionalisme dan etika pelayanan. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.92/2018 tentang Tata Cara dan Syarat Perpindahan Penduduk, jelas Septi, tak ada yang khusus mengatur terkait dengan PPDB.

"Jadi kalau ada yang *neberg*, selama syarat terpenuhi dengan menunjukkan kesediaan pemilik

rumah kami pasti layani," jelasnya.

Koordinasi antara Disdukcapil dengan Disdikpora terkait PPDB, lanjut Septi, sebatas jika ada kesalahan sistem data dan pemberian surat keterangan khusus jika diperlukan. "Untuk surat ini misalnya kemarin ada yang *update* KK karena ada anggota keluarga yang meninggal, terus tertera tanggal rilis KK-nya jadi kurang dari setahun sebelum PPDB, maka kami berikan keterangan anak tersebut sudah tinggal di situ lebih dari 10 tahun," jelasnya.

Disdukcapil juga tak melakukan verifikasi lapangan untuk migrasi warga menjelang PPDB. "Karena dalam aturan Perpres tidak ada yang mengatur itu, asal syaratnya terpenuhi saja," ujarnya.

## PPDB SD

Sementara itu PPDB SD di sejumlah wilayah di DIY diklaim berjalan lancar.

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Arif Prastowo menegaskan bahwa PPDB jenjang SD telah selesai dan berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya, Arif tidak menemui kendala yang berarti.

Arif mengakui ada beberapa sekolah dasar yang pendaftaranya kurang dari 10 anak. Kondisi semacam ini hampir terdapat di semua kapanewon. "Hampir di semua kapanewon terdapat sekolah yang pendaftaranya kurang dari 10 anak," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati tidak menampik ada sejumlah sekolah yang kekurangan murid. Hal ini terlibat dari jumlah kursi yang tersedia dan bisa menampung 14.000 siswa. "Tapi datanya masih diolah. Yang jelas, ada yang tidak memenuhi kuota rombongan belajar," katanya.

Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Tijan, mengatakan sudah mulai menyiapkan pelaksanaan PPDB

secara *online*. Adapun persiapan dengan melakukan kesiapan server untuk pendaftaran agar berjalan dengan lancar.

"Jalurnya masih memakai zonasi sebesar 50 persen, perpindahan orang tua 5 persen, prestasi 30 persen dan afirmasi 25 persen," ujarnya.

Di Sleman, sekolah yang minim pendaftar salah satunya terjadi di di SDN Banyurejo 4. Pada PPDB tahun ini, jumlah siswa yang mendaftar hanya dua. Masih lebih baik dari kondisi tahun lalu yang kosong pendaftar.

Kepala SDN Banyurejo 4, Ismana, mengatakan selama dua tahun terakhir sekolahnya memang minim pendaftar.

Menurut dia hal itu disebabkan penduduk dusun di lingkungan Tangisan, Banyurejo memang tidak ada anak usia masuk SD. "Di tahun ini, dari TK Pantirini di Dusun Tangisan hanya meluluskan dua anak," ucapnya.

Dari dua siswa lulusan TK tersebut semuanya sudah masuk ke SD Negeri Banyurejo 4. "Secara kualitas tidak mengurangi, semangat guru-guru dalam mengajar dan mendidik anak-anak," katanya.

Kepala Bidang SD Disdikpora Bantul, Edy Sutrisno, mengatakan SD yang kekurangan murid masih boleh menerima siswa. "Untuk menyukseskan program wajib belajar, bagi siswa yang belum tertampung, bisa masuk di sekolah bila daya tampung masih memungkinkan," katanya.

Salah satu SD negeri yang kekurangan murid adalah SDN Trirenggo Bantul. Sekolah yang terletak di pusat kota ini baru baru mendapatkan 24 anak.

"Sebenarnya yang mendaftar ada 31 anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, tapi ada beberapa anak yang kemudian mencabut berkas sehingga tinggal 24 anak," kata Kepala SDN Trirenggo, Istiani Nurhasanah.  
(Ujang Hasanudin & Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005